



## Pendekatan *Fraud Hexagon Model* terhadap Indikasi Kecurangan

### Laporan Keuangan pada PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk

Niki Tsamarah<sup>1\*</sup>, Elyanti Rosmanidar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

\*Email [18nikitsamara@gmail.com](mailto:18nikitsamara@gmail.com)

Alamat: Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16, Kabupaten Muaro Jambi

Korespondensi penulis: [18nikitsamara@gmail.com](mailto:18nikitsamara@gmail.com)

**Abstract.** *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*, which consistently shows low in financial performance, has led to allegations of fraudulent financial statements behind this research. The main objective and focus of the research is to analyze indications of fraudulent financial statements at *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* using the *fraud hexagon model*. The type of data used in this research is secondary data in the form of annual reports from 2016-2023 which come from the official website of *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*. The analysis technique in this research is qualitative with a descriptive approach. Based on the research findings, the *Fraud Hexagon Model* consists of 6 elements, where *Stimulus (ROA)* can detect indications of fraudulent financial statements. Meanwhile, *capability* (change of directors), *collusion* (concurrent positions), *opportunity (BDOUT)*, *Rationalization* (change of auditors), and *Ego* (frequency of CEO photos in the annual report) cannot detect fraudulent financial statements at *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*.

**Keywords:** Annual Report, Fraud Hexagon, Fraudulent Financial Statement

**Abstrak.** *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* konsisten menampilkan kinerja keuangan yang kurang baik, hingga menimbulkan dugaan adanya kecurangan laporan keuangan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Tujuan utama serta fokus dalam penelitian yaitu menganalisis indikasi kecurangan laporan keuangan pada *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* menggunakan *fraud hexagon model*. Jenis data yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan tahunan dari tahun 2016-2023 yang berasal dari laman resmi *PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk*. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui hasil temuan penelitian, *fraud hexagon model* terdiri dari 6 elemen, di mana *Stimulus (ROA)* dapat mendeteksi terdapatnya indikasi *kecurangan laporan keuangan*. Sedangkan *Capability* (pergantian direksi), *Collusion* (rangkap jabatan), *Opportunity (BDOUT)*, *Rationalization* (pergantian auditor), dan *Ego* (frekuensi banyaknya foto CEO pada laporan tahunan) tidak dapat mendeteksi adanya *kecurangan laporan keuangan* pada *PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk*.

**Kata kunci:** Laporan Tahunan, *Fraud Hexagon*, Kecurangan Laporan Keuangan

## 1. LATAR BELAKANG

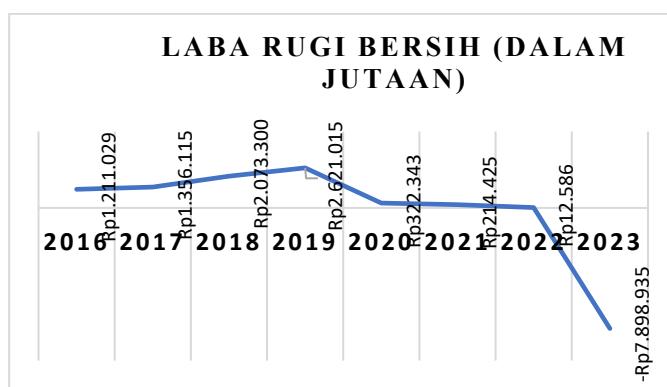
Meningkatnya kasus dan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan berbagai jenis kecurangan di Indonesia menjadi isu penting dikarenakan banyaknya kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan laporan yang dibuat dan diterbitkan oleh *The Association of*

*Received: August 14, 2025; Revised: August 20, 2025; Accepted: August 21, 2025; Online Available: December, 2025; Published: December, 2025;*

\*Corresponding author, e-mail address

*Certified Fraud Examiners* (ACFE), banyaknya jumlah kasus kecurangan yang terjadi menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di kawasan Asia Pasifik dengan 25 jumlah kasus kecurangan yang terjadi sepanjang tahun 2024 (ACFE, 2024).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempati peringkat kedua setelah instansi pemerintah dengan kerugian terbesar dari kecurangan yang terjadi dengan persentase sebesar 31,8%. Berdasarkan data kapitalisasi pasar periode desember 2019, dua dari tiga perusahaan BUMN termasuk dalam *Big Cap* (entitas dengan kapitalisasi besar), sehingga adanya kasus kecurangan yang melibatkan perusahaan BUMN menimbulkan kerugian besar bagi negara (Rizkiawan & Subagio, 2023). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tergolong sebagai BUMN, pada tahun 2023 dicurigai melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, dikarenakan selama beberapa tahun WIKA terus melaporkan adanya keuntungan, sedangkan kondisi arus kas menunjukkan sebaliknya (Liputan6.com, 2023). Fluktuasi laba rugi bersih yang dihasilkan WIKA pada tahun 2016-2023 sebagai berikut:



*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

**Gambar 1. 1 Arus Kas Bersih PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Dari Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 WIKA terus mengalami kerugian dan kesulitan keuangan hingga menimbulkan dugaan *kecurangan laporan keuangan* berdasarkan laporan laba dan arus kas. Pada Tabel 1.1 sejak tahun 2016-2023, terlihat bahwa arus kas yang dimiliki bernilai negatif yang berarti lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan.

**Tabel 1.1**  
**Arus Kas Bersih PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Arus kas dari aktivitas Operasi	Arus kas dari aktivitas Investasi	Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Arus kas bersih
2016	-1.113.344	-1.338.525	9.175.983	9.270.000
2017	1.885.252	-2.637.548	2.727.823	11.253.778
2018	3.935.265	-6.068.318	4.814.069	13.973.766
2019	833.091	-5.482.899	1.039.309	10.346.734
2020	314.191	-5.232.493	9.477.948	14.951.761
2021	-3.740.044	-3.711.048	-524.062	6.983.870
2022	-2.881.595	-1.967.043	3.572.203	5.669.693
2023	-2.895.234	-1.336.045	1.806.126	3.233.071

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Situasi keuangan yang tidak stabil dapat disebabkan oleh operasional perusahaan, kondisi ekonomi dan industri yang menimbulkan tekanan pada manajemen (Achmad dkk., 2022). Situasi keuangan WIKA yang tidak stabil, dapat menimbulkan indikasi adanya tindakan kecurangan laporan keuangan. Didapati sejumlah teori yang mampu diaplikasikan sebagai alat pendekripsi tindakan kecurangan, termasuk teori *fraud hexagon* yang dicetuskan oleh Georgios Vouzinas pada tahun 2019. *Fraud hexagon* merupakan model baru yang lebih kompleks karena merangkum faktor-faktor dari teori-teori kecurangan yang telah ada sebelumnya, dengan menambahkan faktor kolusi. Faktor kolusi sebagai faktor yang mendasari tindakan *kecurangan laporan keuangan* telah divalidasi dalam laporan ACFE bahwa hampir setengah dari kasus kecurangan melibatkan beberapa pelaku yang berkolidasi satu sama lain dalam berbuat kecurangan (Vouzinas, 2019).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan dalam konteks perusahaan, di mana pemilik atau pemegang saham selaku *principal*, sedangkan manajer yang mengelola perusahaan selaku *agent*. Teori agensi mengemukakan bahwa *agent* bertindak berdasarkan keinginan dan kepentingan pribadi atau *self-interest* yang menyebabkan pertentangan dengan kepentingan *principal* (Ghozali, 2020). Adanya tanggung jawab dalam memenuhi ekspektasi target keuangan *principal*, *agent* memanfaatkan berbagai cara untuk memanipulasi laporan keuangan. Sehingga kecurangan laporan keuangan timbul dikarenakan terdapatnya kesempatan yang berencana dipergunakan oleh *agent*.

### B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan kinerja dari setiap transaksi bersifat finansial yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk pihak

yang berkepentingan atas data tersebut seperti pihak internal dan eksternal perusahaan (Jumingan, 2011). Laporan keuangan menyajikan pos-pos keuangan perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Kasmir, 2022).

### C. Kecurangan laporan keuangan

*Fraud* atau kecurangan termasuk dalam tindakan kriminal yang dengan sengaja dilakukan untuk menipu, sehingga merugikan beberapa pihak demi keuntungan pelaku. Di antara 3 jenis kecurangan, kecurangan laporan keuangan termasuk dalam golongan kasus-kasus kecil yang menimbulkan kerugian signifikan pada perusahaan (ACFE, 2020). Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan berbagai cara seperti membesar-besarkan jumlah pendapatan, aset, dan laba, mengecilkan jumlah biaya dan kewajiban, serta pengungkapan yang tidak memadai. Perusahaan harus melakukan pengungkapan informasi yang relevan dan tidak salah saji, sehingga tidak terjadi asimetri informasi dan kesalahan dalam pengambilan keputusan (Oktaviani & Reskino, 2023).

### D. *Fraud Hexagon Model*

Teori terbaru dicetuskan oleh Georgios Vouzinas pada tahun 2019 melengkapi faktor dari teori-teori sebelumnya dengan menambahkan faktor kolusi, sehingga terdapat 6 faktor terjadinya kecurangan. Teori ini dikenal dengan teori *fraud hexagon* sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Fraud Hexagon Model**

Dari Gambar 1.2, terdapat 6 faktor *fraud hexagon model* yakni:

1. *Stimulus*, Tekanan muncul disebabkan keadaan perusahaan, tujuan tidak tercapai, kondisi terdesaknya dana, dan tekanan dari pihak luar (Fatimah, 2023).
2. *Capability*, kemampuan yaitu dapat mengelabui pengawasan internal perusahaan, membuat strategi manipulasi laporan keuangan, serta dapat mengendalikan lingkungan sosial demi keuntungan tersendiri (Alfarago & Mabrum, 2022).

3. *Collusion*, merupakan kolaborasi dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelabui pihak lainnya. Semakin banyak jumlah pelaku kecurangan yang terlibat berkolusi, maka kerugian yang ditimbulkan juga cenderung lebih tinggi (Vousinas, 2019).
4. *Opportunity*, merupakan kondisi adanya kesempatan pelaku. Sistem kontrol dan tata kelola yang tidak efektif, menciptakan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan (Alfarago & Mabrur, 2022).
5. *Rationalization*, merupakan kecenderungan pelaku membenarkan tindakannya yang salah, karena pelaku percaya bahwa tindakan yang dilakukannya rasional dan benar (Khamainy dkk., 2022).
6. *Ego*, merupakan sikap arogan berupa kesombongan atau serakah yang membuat pelaku percaya bahwa pengawasan internal tidak berlaku untuknya. Sehingga ego atau arogansi ini yang mendasari tindakan kecurangan (Vousinas, 2019).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Bersumber pada data berupa kata-kata dan gambar, sehingga jenis penelitian yang diaplikasikan yaitu deskriptif (Semiawan, 2010). Objek penelitian berfokus pada laporan tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2016-2023. Jenis data penelitian yaitu sekunder yang didapat secara tidak langsung berupa dokumen, buku, jurnal, atau sumber dari internet yang relevan (Sugiyono, 2013). Sedangkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Pengecekan keabsahan data mengaplikasikan metode triangulasi di mana objektivitas peneliti berasal dari pemberian dari peneliti lain (Syamsuddin dkk., 2023). Indikator pengukuran berdasarkan 6 faktor *fraud hexagon model* sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Indikator Pengukuran *Fraud Hexagon***

<b>Faktor Fraud</b>	<b>Indikator Pengukuran</b>	<b>Dasar Pengukuran</b>	<b>Satuan Pengukuran</b>
<i>Stimulus</i>	Target Keuangan (ROA)	Perusahaan industri dikatakan baik apabila memiliki rata-rata besaran ROA sebesar 30% atau lebih. (Kasmir, 2022).	Persentase
<i>Capability</i>	Pergantian Direksi	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bab II pasal 3 ayat 3 Nomor 33/PJOK.04/2014 mengenai masa jabatan anggota direksi ( <i>POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, t.t.</i> )	<i>Dummy Variable.</i> Angka 1 jika terjadi pergantian, 0 jika tidak terjadi pergantian direksi.

<i>Collusion</i>	Dualitas CEO	Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Bab II pasal 6 mengenai direksi yang merangkap jabatan ( <i>POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik</i> , t.t.)	<i>Dummy Variable</i> . Angka 1 jika terdapat dualitas, 0 jika tidak terdapat dualitas.
<i>Opportunity</i>	Ketidakefektifan Pengawasan	Dihitung menggunakan rumus BDOUT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat 2 dan 3 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014)	Persentase
<i>Rationalization</i>	Pergantian Auditor	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 ( <i>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik</i> , 2008) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 Nomor 9 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan jasa audit ( <i>POJK 9 TAHUN 2023 - Penggunaan Jasa AP dan KAP</i> , t.t.).	<i>Dummy Variable</i> . Angka 1 jika terjadi pergantian, 0 jika tidak terjadi pergantian auditor.
<i>Ego</i>	Banyak Foto CEO	Perusahaan yang hanya menyediakan 1 foto CEO atau Direksi memiliki tingkat kecurangan yang relatif rendah dalam laporan keuangannya (Isalati dkk., 2023).	<i>Dummy Variable</i>

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan serta pembahasan analisis faktor-faktor teori *fraud hexagon* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dijelaskan sebagai berikut:

##### A. *Stimulus*

**Tabel 1.3**  
**ROA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Laba Bersih		Total Aset	ROA menurut Laporan Tahunan (%)
	(dalam ribuan rupiah)	(dalam ribuan rupiah)		
2016	Rp 1.211.029.310	Rp 31.355.204.690		4,75%
2017	Rp 1.356.115.489	Rp 45.683.774.302		3,52%
2018	Rp 2.073.299.864	Rp 59.230.001.239		3,95%
2019	Rp 2.621.015.140	Rp 62.110.847.154		4,22%
2020	Rp 322.342.513	Rp 68.109.185.213		0,46%
2021	Rp 214.424.794	Rp 69.385.794.346		0,28%

2022	Rp	12.586.435	Rp	75.069.604.222	0,02%
2023	-Rp	7.824.538.997	Rp	65.981.235.888	-0,12%

*Sumber: data diolah, 2025*

Faktor tekanan atau stimulus dapat diketahui berdasarkan target keuangan yang ditunjukkan melalui nilai *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, nilai ROA WIKA pada tahun 2016-2023 pada laporan tahunan menunjukkan nilai yang lebih rendah dari 30%. Semakin besar ROA, semakin optimal pemanfaatan aset dibandingkan dengan laba bersih (Yanti dkk., 2023). Perusahaan industri berada dalam kondisi baik apabila memiliki rata-rata ROA atau lebih tinggi sebesar 30%. Sedangkan ROA yang lebih kecil dibandingkan *benchmark* industri dapat menyiratkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* (Kasmir, 2022). Kondisi ROA yang masih tertinggal dari rata-rata industri, menyiratkan adanya kinerja perseroan yang tidak optimal hingga mengarah ke kecurangan laporan keuangan. Persentase ROA yang dimiliki WIKA sejak tahun 2016 hingga 2023 secara konsisten terus menunjukkan penurunan hingga bernilai -0,12% pada tahun 2023 disebabkan perusahaan mengalami kerugian hingga 7,8 triliun rupiah. Rendahnya nilai ROA WIKA hingga bernilai negatif ini, menunjukkan kurangnya efisiensi dalam mengelola aset menjadi keuntungan, yang mampu menambah tekanan pada manajemen.

## B. *Capability*

**Tabel 1.4**  
**Pergantian Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Jabatan	Direksi Awal Tahun	Direksi Akhir Tahun	Status Pergantian
2016	Direktur Keuangan	Adji Firmantoro	Antonius N.S Kosasih	1
	Direktur HCP	Yasmara Anggadinata	IG.N Askhara	
2017	Direktur Operasi I	Gandira Gutawa Sumapraja	Chandra Dwiputra	1
	Direktur HCP	IG.N. Askhara Danadiputra	Novel Arsyad	
2018	Direktur Utama	Bintang Perbowo	Tumiyana	1
	Direktur Operasi I	Chandra Dwiputra	Agung Budi Waskito	
	Direktur QHSE	-	Danu Prijambodo	
2019	Direktur Keuangan	Antonius N.S Kosasih	Ade Wahyu	1
2020	Direktur Utama	Tumiyana	Agung Budi Waskito	1
	Direktur operasi II	Bambang Pramujono	Harum Akhmad Zuhdi	

	Direktur Operasi III	Destiawan Soewardjono	Sugeng Rochadi	
	Direktur QHSE	Danu Prijambodo	Rudy Hartono	
2021	Direktur Operasi III	Sugeng Rochadi	Rudy Hartono	1
	Direktur QHSE	Rudy Hartono	Ayu Widya Kiswari	
2022	Direktur Keuangan	Ade Wahyu	Adityo Kusumo	1
	Direktur HCP	Mursyid	Hadjar Seti Adji	
2023	-	-	-	0

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Melalui Tabel 1.4, sejak tahun 2016-2022 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara rutin terus mengalami pergantian direksi. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan dua kali pergantian direksi di setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga 2022. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam laporan tahunan Pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pergantian direksi disebabkan beberapa alasan yaitu, habisnya masa jabatan, perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perseroan, dan pengalihan penugasan, kinerja yang terus menurun seperti yang terlihat pada laporan arus kas, laporan laba rugi, dan beberapa rasio keuangan dapat menjadi alasan terjadinya pergantian direksi. Ini merupakan langkah perusahaan untuk membenahi kinerja direksi masa lampau dengan mengubah direksi yang diperkirakan lebih kompeten (Imtikhani & Sukirman, 2021). Oleh karena itu, pergantian direksi pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak dapat mengindikasikan kecurangan laporan keuangan.

### C. Collusion

**Tabel 1.5**  
**Dualitas Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Status Dualitas
2016	0
2017	1
2018	1
2019	1
2020	1
2021	1
2022	1
2023	0

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Melalui Tabel 1.5, sejak tahun 2017-2022 terlihat bahwa jajaran direksi memiliki jabatan pada perusahaan lain selain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Rangkap jabatan yang dimiliki oleh jajaran direksi ini diperbolehkan dan tidak mengindikasikan adanya tindakan kecurangan laporan keuangan, karena sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 24 ayat 3 (*POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*, t.t.) menjelaskan:

“anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.”

#### **D. Opportunity**

**Tabel 1.6**  
**Persentase BDOUPT. Wijaya Karya (Persero) Tbk**

<b>Tahun</b>	<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>BDOUPT</b>
2016	6	2	33%
2017	6	2	33%
2018	7	3	43%
2019	7	3	43%
2020	7	3	43%
2021	7	4	57%
2022	7	4	57%
2023	7	4	57%

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Pada Tabel 1.6 di atas, faktor ketidakefektifan pengawasan yang dihitung menggunakan rumus *Board of Directors Outside Directorships* (BDOUPT) pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk jumlah komisaris independen dengan persentase lebih dari 30% yaitu sebesar 33% hingga 57%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat 3 (*POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*, t.t.) menyatakan bahwa:

“Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang harus memiliki persentase 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris”

**E. Rationalization**

**Tabel 1.7**  
**Pergantian Auditor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

<b>Tahun</b>	<b>Nama KAP</b>	<b>Auditor Lama</b>	<b>Auditor Baru</b>	<b>AUDCHANGE</b>
2016	Soejatna, Mulyana, & Rekan	Safaat Widjadjabrat	-	0
2017	Soejatna, Mulyana, & Rekan	Safaat Widjadjabrat	Henri Arifan Rudi	1
2018	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)	Henri Arifian	Hartono Purba	1
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rudi Hartono Purba	-	0
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rudi Hartono Purba	-	0
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rudi Hartono Purba	Benny Andria	1
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Benny Andria	-	0
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Benny Andria	-	0

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Melalui tabel 1.7, pergantian auditor diukur dengan ditandai angka 1 ketika terjadi pergantian auditor dan angka 0 apabila tidak terjadi pergantian auditor. Pada tahun 2016 hingga 2023 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengalami pergantian auditor sebanyak 3 kali, maksimal 3 tahun buku secara berurutan. Pergantian auditor pada tahun 2017 dan 2018 ini disebabkan Akuntan Publik yang ditunjuk tidak mampu merampungkan audit laporan keuangan konsolidasian persero dan laporan tahunan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan perseroan. Berdasarkan hasil penelitian, pergantian auditor yang terdapat pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak mengindikasikan tindakan *kecurangan laporan keuangan*. Pergantian auditor dilakukan karena kurang puas dengan kinerja auditor sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan untuk mematuhi peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 Nomor 9 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan jasa audit (*POJK 9 TAHUN 2023 - Penggunaan Jasa AP dan KAPf, t.t.*) menjelaskan bahwa:

“(1) Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.”

#### F. *Ego*

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Foto CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Bagian Laporan	CEO/Direktur	Jumlah Foto	Total
2016	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	7
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	6	
2017	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	7
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	6	
2018	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	9
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	8	
2019	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	8
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	7	
2020	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	8
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	7	
2021	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	9
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	8	
2022	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	9
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	8	
2023	Laporan Direksi	Direktur Utama	1	8
	Profil Direksi	Jajaran Direksi	7	

*Sumber: <https://www.wika.co.id>, data diolah 2025*

Pada Tabel 1.8, hasil penelitian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menunjukkan bahwa frekuensi foto CEO atau Direksi yang tertera dalam laporan direksi dan profil jajaran direksi dalam laporan tahunan yang jumlah rata-rata kemunculannya sebanyak 1 kali, bertujuan untuk kepentingan pelaporan yang dipakai sebagai sarana menginformasikan kepada publik dan pengguna laporan keuangan, dan bukan dimaksudkan demi kepentingan pribadi maupun untuk menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak diterapkan pada posisi yang dimilikinya. Sehingga beberapa foto CEO atau Direksi menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki tingkat arogansi rendah dan oleh karena itu tidak terdorong untuk berbuat tindakan kecurangan laporan keuangan (Isalati dkk., 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan arogansi yang dicerminkan oleh frekuensi banyaknya foto CEO tidak berpengaruh pada indikasi kecurangan laporan keuangan (Khamainy dkk., 2022).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- a. *Stimulus* atau tekanan melalui *Return on Assets* (ROA) menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki nilai ROA di bawah standar industri. Rendahnya nilai ROA ini menunjukkan perusahaan kurang efisien dalam memaksimalkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan dari aset yang dimilikinya.
- b. *Capability* atau kemampuan melalui pergantian direksi menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk seringkali mengadakan pergantian direksi. Hanya saja, pergantian direksi tidak mengindikasikan terdapatnya kecurangan laporan keuangan karena dilakukan guna mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan, dan keputusan yang dihasilkan dari RUPS.
- c. *Collusion* atau kolusi melalui rangkap jabatan menunjukkan bahwa jajaran direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki rangkap jabatan yang mengacu pada peraturan dan masih diperbolehkan, sehingga tidak mengindikasikan kecurangan laporan keuangan.
- d. *Opportunity* atau peluang melalui nilai *Board of Directors Outside Directorships* (BDOOUT) menunjukkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki persentase nilai BDOOUT yang berada di atas standar minimal nilai BDOOUT yang baik. sehingga tidak mengindikasikan kecurangan laporan keuangan.
- e. *Rationalization* atau rasionalisasi melalui pergantian auditor menunjukkan bahwa pergantian auditor pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk guna membenahi performa auditor sebelumnya serta memaksimalkan kualitas laporan keuangan, dan mematuhi peraturan mengenai batas masa penggunaan jasa audit.
- f. *Ego* atau arogansi melalui frekuensi banyaknya foto CEO atau direksi pada laporan tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menunjukkan bahwa foto direksi dalam laporan tahunan bertujuan untuk kepentingan pelaporan sebagai sarana menginformasikan kepada publik dan pengguna laporan keuangan, tanpa ditujukan demi kepentingan pribadi.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu bagi perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai subjek penelitian untuk dapat meningkatkan sistem pengawasan internal perusahaan. Bagi Akademisi, disarankan mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan indikator-indikator *fraud hexagon model* selain yang terdapat pada penelitian ini, guna mendeteksi kecurangan laporan keuangan agar hasil penelitian lebih tepat mengenai penentuan terdapat atau tidak terdapatnya kecurangan dalam laporan keuangan, serta membandingkan beberapa perusahaan pada sektor yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2020). *Report to The Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse* (3). The Association of Certified Fraud Examiners.
- ACFE. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to The Nations*. The Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf>
- Achmad, T., Ghazali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2022). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Hexagon Model: Evidence from the Banking Sector in Indonesia. *Economies*, 11(1), 5. <https://doi.org/10.3390/economies11010005>
- Alfarago, D., & Mabrus, A. (2022). Do Fraud Hexagon Components Promote Fraud in Indonesia? *ETIKONOMI*, 21(2), 399–410. <https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.24653>
- Fatimah, I. I. (2023). *Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Suatu Pendekatan Teori Fraud Hexagon*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Ghazali, I. (2020). *25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Imtikhani, L., & Sukirman, S. (2021). Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.24167/jab.v19i1.3654>
- Isalati, N. S., Azis, M. T., & Hadiwibowo, I. (2023). Eteksi Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Fraud Hexagon. *Jurnal Akuntansi Dewartara*, 07(01).
- Jumingan. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Bumi Aksara.
- Kasmir. (2022). *Analisis Laporan Keuangan* (Revisi). Rajawali Pers.
- Khamainy, A. H., Amalia, M. M., Cakranegara, P. A., & Indrawati, A. (2022). Financial Statement Fraud: The Predictive Relevance of Fraud Hexagon Theory. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(1), 110–133. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i1.249>
- Liputan6.com. (2023, Juni 6). *Waskita Karya dan Wijaya Karya Diduga Manipulasi Laporan Keuangan Bertahun-tahun*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5311726/waskita-karya-dan-wijaya-karya-diduga-manipulasi-laporan-keuangan-bertahun-tahun>

- Oktaviany, F., & Reskino. (2023). Financial Statement Fraud: Pengujian Fraud Hexagon dengan Moderasi Audit Committee. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(1), 91–118. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.1799>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik*. (2008). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/17-pmk-01-2008>
- POJK 9 TAHUN 2023—Penggunaan Jasa AP dan KAP.pdf*. (t.t.).
- POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf*. (t.t.). D <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf>
- Rizkiawan, M., & Subagio, S. (2023). Analisis Fraud Hexagon dan Tata Kelola Perusahaan Atas Adanya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 269–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.909>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, Gani, R. A., Bugis, H., Towe, M. M., Guntur, M., Maulidah, S., Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Yanti, I. P. F., Usdeldi, U., & Muthmainnah, M. (2023). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3), 391–409. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.607>
- Peraturan dan Undang-Undang:**
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik*. (2008). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/17-pmk-01-2008>
- POJK 9 TAHUN 2023—Penggunaan Jasa AP dan KAP.pdf*. (t.t.).
- POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf*. (t.t.). D <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf>